

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mesnengah Saerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, merupakan tahun pertama dari perodesasi RPJMD, disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada RPJMD sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, memperhatikan sinergitas yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, memperhatikan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi masyarakat dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu Partisipatif, Teknokratis, Top-down Planning dan Botom-up Planning serta Politis.

Sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 pada Pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah..

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II (Bulan April 2019) dan perkembangan yang tidak sesuai dengan perkembangan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan evaluasi perhitungan anggaran tahun 2019 terhadap asumsi kemampuan APBD tahun 2019, yaitu asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penurunan dari asumsi awal APBD induk 2019, sehingga mempengaruhi kemampuan belanja daerah yang diperhitungkan mengalami defisit. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian dan pengurangan belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Perangkat Daerah.

Dari penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 untuk menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahanasumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Magetan tahun 2019. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Perubahan KUA PPAS APBD 2019 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5).*
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
6. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.*

7. *Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan*
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan 2005-2025.
9. Dokumen RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023 (yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023) Nomor 1 tahun 2019.
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
11. *Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019*

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan Renja Perangkat Daerah tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan Renja Perangkat Daerah induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Hubungan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renja Perangkat Daerah induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja.
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja.
4. Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran.
5. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB Dan PPPA) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk memadukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.
2. Sebagai acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat pada DPPKB Dan PPPA Kabupaten Magetan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan Renstra DPPKB Dan PPPA Kabupaten Magetan dan RPJMD Kabupaten Magetan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi dasar pertimbangan perlunya dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pendanaan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bersisi tentang uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.5 Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah

Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi uraian evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan target Renstra Perangkat Daerah).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran/perubahan pagu kegiatan antar Program dan Kegiatan, Penambahan Program dan Kegiatan, Penambahan Pagu Anggaran, Pengurangan Pagu Anggaran serta perubahan target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2019 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja DPPKB DAN PPPA dalam melaksanakan anggaran tahun 2019 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdapat pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Magetan. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2019 dijadikan dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja DPPKB DAN PPPA.

Tujuan evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2019 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut disajikan tabel hasil Evaluasi Capaian Kinerja DPPKB dan PPPA tahun 2019 :

TABEL 2.1
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			RKPD 2019	P-RKPD 2019	
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Indeks Pembangunan gender	Angka	93.25	93.25	93.55
	Rasio KDRT	%	0.03	0.03	0.03
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	78.60	78.60	78.60
	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten layak Anak (KLA)	Skor	670	670	710
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka	0.21	0.21	0.16
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.17	2.17	2.13
	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR)	%	76.5	76.5	77.3
	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	tahun	20.1	20.1	21
	Persentase Wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDG's)	%	8.00	8.00	7.50
	Rasio ketergantungan	%	43.40	43.40	43.00

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RENJA tahun 2019. Memperhatikan tahapandan tata waktu dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan RENJA tahun 2019 maka kegiatan evaluasi pelaksanaan RENJATahun 2019 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2019. Hasil Evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RENJA dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA Tahun 2019 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Evaluasi RENJAtahun 2019 sampai dengan Triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan capaian Triwulan II program dan kegiatan DPPKB DAN PPPA dengan capaian yang harus dicapai pada RENJA tahun 2019 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra DPPKB DAN PPPA .

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan RENJA DPPKB DAN PPPA tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Periode Pelaksanaan : 2019 TRIWULAN II

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Ket.																					
								I			II																														
3	4	5		6		7		8			9			12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12		15=14/5 x100		17																					
		target renstra perhitungan bappeda karena tidak terjumlah di app	K		K		K		K		K		K		K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn																			
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan																		
-4	-5	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37																			
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %	100	100	570.000.000			2	angka	130.000.000					9.201.900																											
Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Dokumen	8	5	450.000.000			4	Dokumen	90.000.000					1	Dokumen	9.201.900	25,00	10,22	1,00	25,00	9.201.900	13	2	V																	
Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan Kegiatan	20	20	100.000.000			4	Kegiatan	20.000.000						Kegiatan										-	V															
Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelenggaraan DAK Bidang Pengendalian Penduduk %			20.000.000			4	Kegiatan	20.000.000						Kegiatan												#DIV/0!														
Rata-rata capaian kinerja (%)															8,33	7,08																									
Predikat kinerja																																									
Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten %	100	100	4.553.500.000			100	%	910.700.000					%	221.882.400																										
Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kali	60	60	150.000.000			12	Kegiatan	30.000.000					2	Kegiatan	6.723.450	16,67	22,41	2,00	16,67	6.723.450,00	3,33	4,48	V																	
Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan) Orang	6.875	6875	4.403.500.000			1.375	Orang	880.700.000						Orang	215.158.950		24,43			215.158.950,00		4,89	V																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															8,33	24,36																									
Predikat kinerja																																									

Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	35	35	500.000.000		27	%	100.000.000	%	11.451.250	%	-													
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Akseptor	1.750	1800	500.000.000	-	350	Akseptor	100.000.000	40	Akseptor	11.451.250	Akseptor	-	40	Akseptor	11.451.250	11,43	11,45	40,00	11,43	11.451.250,00	2,29	2,29	V	
Rata-rata capaian kinerja (%)																11,43	11,45				2,29	2,29			
Predikat kinerja																									
Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR %	73,5	73,5	900.000.000		73	%	180.000.000	%	7.716.429	%	53.169.800													
Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan	30	30	400.000.000	-	6	Kegiatan	80.000.000	1	Kegiatan	7.716.429	Kegiatan	3.869.800	1	Kegiatan	11.586.229	16,67	14,48	1,00	16,67	11.586.229,00	3,33	2,90	V	
Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE Akseptor	550	550	250.000.000	-	110	Akseptor	50.000.000	-	Akseptor	-	42	Akseptor	49.300.000	42	Akseptor	49.300.000	38,18	98,60	42,00	38,18	49.300.000,00	7,64	19,72	V
Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB Orang	500	500	150.000.000	-	100	Orang	30.000.000	-	Orang	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah Fasilitasi Kasus Komplikasi/kegagalan KB Kali	40	42	100.000.000	-	8	orang	20.000.000	-	orang	-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
Rata-rata capaian kinerja (%)																13,71	33,83				2,74	6,77			
Predikat kinerja																									

Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga %	75	75	1.250.000.000			71	%	250.000.000		%	59.680.000		%	-																				
Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Orang	2.350	2215	1.250.000.000	-		470	Orang	250.000.000	118	Orang	59.680.000		Orang	-	118	Orang	59.680.000	25,11	23,87	118,00	25,11	59.680.000,00	5,02	4,77	V									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,11	23,87					5,02	4,77							
																			Predikat kinerja																
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB %	75	75	300.000.000			55	%	60.000.000		%	-		%	-																				
Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS Orang	1.000	1000	300.000.000	-		200	kelompok	60.000.000	-	kelompok	-		kelompok	-	-	kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					-	-							
																			Predikat kinerja																
Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmear %	3,5	3,5	350.000.000			3	%	70.000.000		%	-		%	14.389.350																				
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear peserta	3.500	3500	350.000.000	-		700	peserta	70.000.000	-	peserta	-		peserta	14.389.350	-	peserta	14.389.350	-	20,56	-	-	14.389.350,00	-	4,11	V									
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	20,56					-	4,11							
																			Predikat kinerja																

Dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan 2019, DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan terdapat penambahan pagu anggaran dan pergeseran anggaran. Untuk penambahan pagu anggaran terdapat pada Belanja Tidak Langsung berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PA, PPK, Bendahara PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang 18 Balai Penyuluhan KB Kecamatan sebesar Rp 57.000.000.

Pergeseran pagu anggaran terdapat pada Program Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Belanja Alat tulis Kantor yaitu Belanja Alat Tulis Kantor dari Rp 13.672.950 berubah menjadi Rp 20.534.450. Belanja Makanan dan Minuman dari Rp 26.461.300 menjadi Rp 17.592.000. Belanja Jasa Service Peralatan Kantor dari Rp 11.560.000 menjadi Rp 11.730.300 dan Belanja Cetak dari Rp 4.224.900 menjadi Rp 6.062.400.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) terjadi pergeseran pengurangan Belanja Jasa Tenaga Kerja dan dialihkan ke Perjadin Luar Daerah.

Penambahan naggaran terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik (BOKB). Tetapi kegiatan ini sudah dilaksanakan melalui Perubahan Penjabaran. Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah dengan pagu anggaran Rp 184.620.000
2. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana dengan pagu anggaran Rp 240.001.000
3. Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK dengan pagu anggaran Rp 5.071.827.000
4. Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD dengan pagu anggaran Rp 197.600.000

5. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB dengan pagu anggaran Rp 161.200.000

**TABEL 2.3
TARGET CAPAIAN KINERJA DPPKB DAN PPPA KABUPATEN MAGETAN
DALAM PERUBAHAN RKPD 2019**

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						3.080.000.000	8.935.248.000	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						400.000.000	400.000.000	
1	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak	80%	80%	90.000.000	90.000.000
		1.1	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000
		2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Korban KDRT Yang Mendapatkan Penanganan	- Persen	100 Persen	190.000.000	190.000.000
		2.1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG; Profil Data Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000
		2.2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A)	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A)	Jumlah Korban KDRT Yang Difasilitasi	100 orang	100 orang	120.000.000	120.000.000

		2.3 Penyusunan Profil Gender dan Anak	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah dokumen profil data gender dan anak yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	
		3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta	25%	25%	120.000.000	120.000.000	
		3.1 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	401 orang	180 orang	55.000.000	55.000.000	
		3.2 Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	2 orang	2 orang	40.000.000	40.000.000	
		3.3 Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender	Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	150 orang	150 orang	25.000.000	25.000.000	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2.680.000.000	8.535.248.000	
		4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	75 skor	80,5 skor	515.000.000	515.000.000	
		4.1 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur	100%	100%	150.000.000	150.000.000	
		4.2 Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	

		4.3 Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi Perkantoraan	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi Perkantoraan	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	350.000.000	350.000.000	
		5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen	325.000.000	509.620.000	
		5.1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	12 unit	8 unit	125.000.000	125.000.000	
		5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara	19 unit	19 unit	150.000.000	150.000.000	
		5.3 Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah Genre Kit Untuk Kelompok PIK Remaja	0 paket	6 paket	0	184.620.000	DAK Fisik melalui perubahan penjabaran
		5.4 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	3 unit	3 unit	50.000.000	50.000.000	
		6 Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR	72,50%	72,68%	180.000.000	180.000.000	
		6.1 Pelayanan KIE	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE	110 akseptor	110 akseptor	50.000.000	50.000.000	
		6.2 Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB	100 Orang	100 Orang	30.000.000	30.000.000	
		6.3 Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke masyarakatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	80.000.000	80.000.000	
		6.4 Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah fasilitasi kasus komplikasi/ kegagalan KB	10 orang	10 orang	20.000.000	20.000.000	

		7	Program pelayanan kontrasepsi	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	27%	100.000.000	100.000.000	
		7.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	400 akseptor	400 akseptor	100.000.000	100.000.000	
		8	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB	100%	100%	0	5.670.628.000	
		8.1	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Jumlah Pengadaan laptop	0 Unit	20 Unit	0	240.001.000	DAK Fisik melalui perubahan penjabaran
		8.2	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan, Kelengkapan Sarana Kerja, Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK pada Balai Penyuluhan KB	0 persen	100 persen	0	5.071.827.000	DAK Fisik melalui perubahan penjabaran
		8.3	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Jumlah Pengadaan sarana kerja bagi PPKBD	0 paket	76 paket	0	197.600.000	DAK Fisik melalui perubahan penjabaran
		8.4	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah pengadaan alat penyimpan alat kontrasepsi	0	13 unit	0	161.200.000	DAK Fisik melalui perubahan penjabaran

		9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan , kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	85.000.000	85.000.000	
		9.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	8 dokumen	9 dokumen	30.000.000	30.000.000	
		9.2	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA	200 orang	200 orang	45.000.000	45.000.000	
		9.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	10.000.000	
		10	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan data kependudukan	100%	100 persen	130.000.000	130.000.000	
		10.1	Pendataan Keluarga	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	
		10.2	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan	4 Kali	4 Kali	20.000.000	20.000.000	
		10.3	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase penyelenggaraan DAK Bidang pengendalian penduduk	100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	

		11	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten	100%	100%	910.700.000	910.700.000	
		11.1	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Kegiatan	12 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	
		11.2	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan)	1375 orang	1375 orang	880.700.000	880.700.000	
		12	Program Kesehatan Reproduksi	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmear	2.5 %	2.5 %	70.000.000	70.000.000	
		12.1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear	700 peserta	700 peserta	70.000.000	70.000.000	
		13	Program Bina Ketahanan Keluarga	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	75%	71%	250.000.000	250.000.000	
		13.1	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan	335 Kader	335 Kader	250.000.000	250.000.000	

		14	Program Generasi Berencana	Program Generasi Berencana	Persentase Pernikahan Pertama Perempuan Di Bawah Usia 21 Tahun	20,1 Perten	8,51 Perten	54.300.000	54.300.000	
		14.1	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	5 Kelompok	5 Kelompok	54.300.000	54.300.000	
		15	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	75%	55%	60.000.000	60.000.000	
		15.1	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	200 orang	200 orang	60.000.000	60.000.000	
								3.080.000.000	8.935.248.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2019 tetap mengacu pada RENJA DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan Tahun 2019 yang merupakan tahun pertama dari perodesasai Renstra DPPKB Dan PPPA Kabupaten Magetan tahun 2018-2023.

Kebijakan priorotas yang ditetapkan dalam perubahan RENJA tahun 2019 adalah pergeseran pagu anggaran pada program dan kegiatan, penambahan pagu anggaran pada program dan kegiatan, pengurangan pagu anggaran pada program dan kegiatan serta perubahan target kinerja pada program dan kegiatan.

Selanjutnya secara lebih rinci, progam dan kegiatan pada Perubahan RENJA tahun 2019 pada DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 (NILAI USULAN)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019									PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		KETERANGAN RPKD PERUBAHAN
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp.)			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						3.080.000.000	8.935.248.000	5.855.248.000					
	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						400.000.000	400.000.000	0					
	2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak	80 %	- %			90.000.000	90.000.000	0					
1	2.02.15.007	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Pelaporan KLA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	90.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen			
	2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						190.000.000	190.000.000	0					
2	2.02.16.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Pelaksanaan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen			
3	2.02.16.012	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A)	Jumlah Pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 pengaduan	100 pengaduan	Kabupaten	Kabupaten	120.000.000	120.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 pengaduan		Pengurangan belanja jasa tenaga kerja dan dialihkan ke perajin luar daerah	
4	2.02.16.013	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah Penyusunan profil data gender	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 dokumen			

	2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif	25 %	- %			120.000.000	120.000.000	0				
5	2.02.18.004	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah pembinaan dan pelatihan bagi Pelaku Industri Rumahan	401 Kali	401 Kali	Kabupaten	Kabupaten	55.000.000	55.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kali		
6	2.02.18.008	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	2 Kali	2 Kali	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000	40.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kali		
7	2.02.18.009	Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah PNS yang diberikan pelatihan pengambilan keputusan	150 Peserta	150 Peserta	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Peserta		
	2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2.680.000.000	8.535.248.000	5.855.248.000				
	2.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	75 skor	- skor			515.000.000	515.000.000	0				
8	2.08.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur	100 %	100 %	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 %		
9	2.08.01.022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	15.000.000	15.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 dokumen		
10	2.08.01.024	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000	350.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 persen		Pergeseran antar kode rekening

	2.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana	100 persen	- persen			325.000.000	509.620.000	184.620.000				
			Aparatur yang layak fungsi											
11	2.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	12 paket	12 paket	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000	125.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 paket		
12	2.08.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara	19 unit	19 unit	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000	150.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 unit		
13	2.08.02.031	Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	8 paket untuk kelompok PIK Remaja	0 paket	8 paket	Kabupaten	Kabupaten	0	184.620.000	184.620.000	DAK	0 paket		Kegiatan DAK melalui Perubahan Penjabaran
14	2.08.02.039	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	3 unit	3 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 unit		
	2.08.15	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR	72,5 %	- %			180.000.000	180.000.000		0			
15	2.08.15.002	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE	110 akseptor	110 akseptor	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 akseptor		
16	2.08.15.007	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta kelompok keluarga KB	100 Orang	100 Orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Orang		
17	2.08.15.010	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	80.000.000	80.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kegiatan		
18	2.08.15.012	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah fasilitasi kasus komplikasi/ kegagalan KB	10 orang	10 orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000		0 Dana Alokasi Umum (DAU)	0 orang		

	2.08.17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 %	- %			100.000.000	100.000.000	0				
19	2.08.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	400 akseptor	400 akseptor	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000	100.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 akseptor		
	2.08.25	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB	100 %	- %			0	5.670.628.000	5.670.628.000				
20	2.08.25.002	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Pengadaan 18 laptop untuk mengolah data di 18 Balai Penyuluhan dan 2 laptop untuk menolah data di Dinas PPKB PPPA	0 Unit	20 Unit	Kabupaten	Kabupaten	0	240.001.000	240.001.000	DAU/ DBH Pusat	0 Unit		Kegiatan DAK Fisik melalui Perubahan Penjabaran
21	2.08.25.003	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPB	18 Balai Penyuluhan KB	0 Balai Penyuluhan	18 Balai Penyuluhan	Kabupaten	Kabupaten	0	5.071.827.000	5.071.827.000	DAK	0 Balai Penyuluhan		Kegiatan DAK Non Fisik dilaksanankan melalui Perubahan Penjabaran
22	2.08.25.005	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	76 paket sarana kerja bagi PPKBD	0 paket	76 paket	Kabupaten	Kabupaten	0	197.800.000	197.800.000	DAK	0 paket		Kegiatan DAK Fisik melalui Perubahan Penjabaran
23	2.08.25.008	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	13 Unit Alat Penyimpan Alat Kontrasepsi untuk 13 Faskes Yang melayani Pemasangan Kontrasepsi	0	13	Kabupaten	Kabupaten	0	161.200.000	161.200.000	DAU/ DBH Pusat	0		Kegiatan DAK Fisik melalui Perubahan Penjabaran

	2.08.27	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	- persen			85.000.000	85.000.000	0			
24	2.08.27.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	8 dokumen	8 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 dokumen	
25	2.08.27.002	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Rakorda	200 orang	200 orang	Kabupaten	Kabupaten	45.000.000	45.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 orang	
26	2.08.27.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	10.000.000	10.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 dokumen	
	2.08.28	Program Pengendalian Penduduk	Angka Total Fertility rate (TFR)	2,03 Angka	- Angka			130.000.000	130.000.000	0			
27	2.08.28.001	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen (Data)	1 Dokumen (Data)	Kabupaten	Kabupaten	90.000.000	90.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen (Data)	
28	2.08.28.002	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan	4 Kali	4 Kali	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kali	
29	2.08.28.003	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase penyelenggaraan DAK Bidang pengendalian penduduk	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 persen	

	2.08.29	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten	100 %	- %			910.700.000	910.700.000	0				
30	2.08.29.001	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kegiatan		
31	2.08.29.002	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan)	1375 orang	1375 orang	Kabupaten	Kabupaten	880.700.000	880.700.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 orang		
	2.08.30	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmear	2,5 %	- %			70.000.000	70.000.000	0				
32	2.08.30.001	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Perlindungan Hak Reproduk siindividu (Papsmear)	700 peserta	700 peserta	Kabupaten	Kabupaten	70.000.000	70.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 peserta		
	2.08.31	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	75 %	- %			250.000.000	250.000.000	0				
33	2.08.31.001	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan	335 Kader	335 Kader	Kabupaten	Kabupaten	250.000.000	250.000.000	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	0 Kader		

2.08.32	Program Generasi Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20,1 Tahun	- Tahun			54.300.000	54.300.000	0				
34	2.08.32.001	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	5 Kelompok	5 Kelompok	Kabupaten	Kabupaten	54.300.000	54.300.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kelompok	
2.08.33	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	75 %	- %			60.000.000	60.000.000	0				
35	2.08.33.001	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS	400 Kelompok UPPKS	400 Kelompok UPPKS	Kabupaten	Kabupaten	60.000.000	60.000.000	0	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Kelompok UPPKS	
TOTAL							3.080.000.000	8.935.248.000	5.855.248.000				0

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja pada DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019. Perubahan RENJA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Magetan dan Perencanaan Strategis (Renstra) DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan Tahun 2013-2019.

Perubahan RENJA pada DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RENJA tahun 2019 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPPKB DAN PPPA Tahun 2019.
2. Perubahan RENJA Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
3. Perubahan APBD Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magetan khususnya pada DPPKB DAN PPPA Kabupaten Magetan.

Magetan, Juli 2019
Plt. KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA
KABUPATEN MAGETAN

Drh. KUSTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19601103 199203 2 001